

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

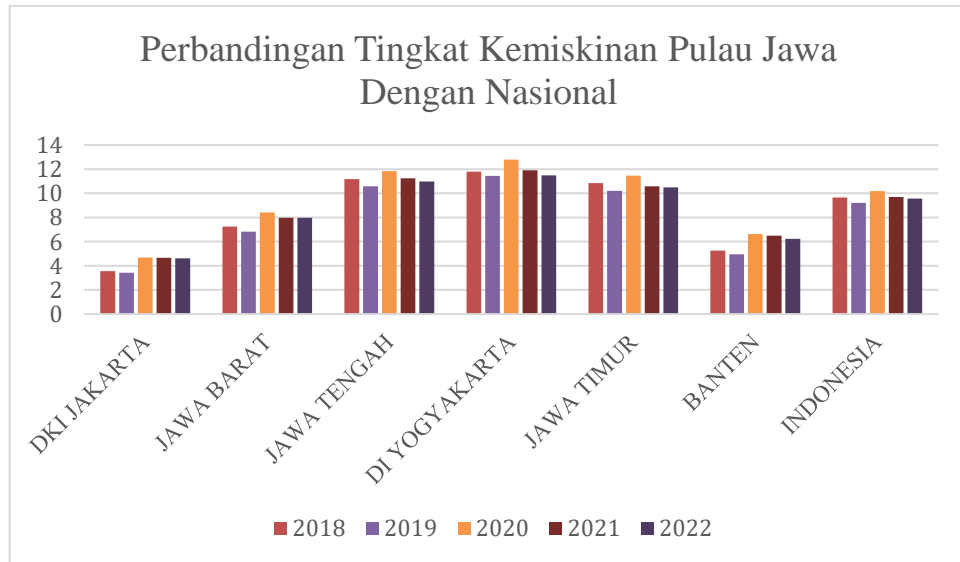
Kemiskinan yaitu satu dari banyaknya isu yang sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, isu tersebut lebih sering terjadi pada negara berkembang. Diantara negara-negara berkembang, Indonesia masih menghadapi isu kemiskinan. Pemerintah Indonesia masih sangat memperhatikan isu tersebut karena telah berlangsung lama, namun hingga kini isu tersebut belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Dengan belum berakhirnya kemiskinan tersebut dapat menjadi hambatan terhadap segala hal contohnya yaitu tertinggalnya kemampuan masyarakat untuk mengikuti perkembangan teknologi; terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, serta adanya ketimpangan sosial dan ekonomi; terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan; terbatasnya kemampuan dasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; dan terbatas dalam mendapatkan kesempatan kerja.

Kemiskinan adalah kondisi di mana seorang masyarakat tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar hidup terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti yang terjadi pada masyarakat lain (Elvinna Rindiani, 2023). Keterbatasan ekonomi yang dialami oleh masyarakat dalam memperoleh penghasilan yang konsisten untuk mencukupi kebutuhan dasar kehidupan, dan kendala yang dihadapi oleh sekelompok individu dalam menjalankan kehidupan sosial secara optimal, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan kemiskinan (Wulandari, 2019). Menurut (Todaro, 2011) dalam (Fadila, R., & Marwan, M., 2020), Kemiskinan diklasifikasikan menurut karakteristiknya yaitu kemiskinan absolut

dan kemiskinan relatif. Kemiskinan yang diakibatkan oleh penduduk yang berpenghasilan di bawah ambang batas upah minimum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan primer contohnya sandang, pangan, dan papan yang didefinisikan sebagai kemiskinan absolut. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan ketimpangan ekonomi, yaitu kondisi dimana masyarakat yakin dapat mencukupi kebutuhan primer tetapi pendapatannya masih di bawah penghasilan rata-rata masyarakat lain. Akibatnya, muncul kesenjangan sosial dan ekonomi yang menyebabkan mereka tetap dianggap miskin jika dibandingkan dengan standar hidup di lingkungan mereka.

Pulau Jawa yang termasuk dalam bagian gugusan kepulauan di wilayah Indonesia di mana didalamnya terdapat lebih dari satu provinsi yang memiliki nilai tingkat kemiskinan lebih besar jika berbanding dengan nasional. Provinsi tersebut memiliki nilai tingkat kemiskinan diatas 10 persen sementara nilai tingkat kemiskinan nasional memiliki nilai dibawah 10. Berikut grafik perbandingan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa dengan nasional selama periode 2018 hingga 2022 yang dilansir oleh BPS:

**Grafik 1.1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Di Pulau Jawa Dengan Nasional Tahun 2018-2022**



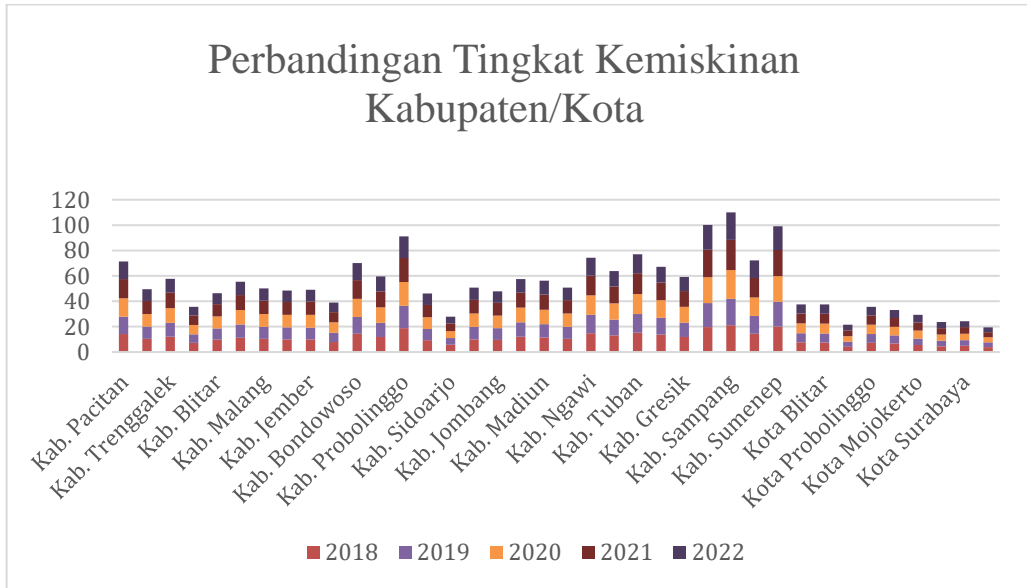
Sumber: BPS Indonesia 2024, Data diolah

Dalam grafik 1.1 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Pulau Jawa terdapat tiga provinsi yang selama lima tahun berturut-turut mengalami fluktuasi yang secara keseluruhan memiliki nilai tingkat kemiskinan diatas nilai tingkat kemiskinan nasional. Tiga provinsi tersebut yaitu DI Yogyakarta yang menempati urutan pertama, kemudian Jawa Tengah menempati urutan kedua. Sedangkan provinsi yang memiliki persentase terendah dari keenam provinsi yang ada di pulau Jawa adalah DKI Jakarta. Dan Jawa Timur berada pada urutan ketiga dengan nilai persentase berfluktuasi yaitu pada tahun 2021-2022 tingkat kemiskinannya mengalami penurunan namun nilai tersebut masih berada diatas nilai nasional.

Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah administratif yang berada di bagian ujung timur Pulau Jawa. Berdasarkan data BPS, sebagian Kabupaten atau Kota tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan selama tahun

2018-2022 berturut-turut mengalami fluktuasi. Berikut perbandingan nilai tingkat kemiskinan antar kabupaten/ kota di Jawa Timur menurut BPS Jatim:

**Grafik 1.2 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Di Seluruh Kabupaten atau Kota Di Jawa Timur Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Jawa Timur 2024, Data diolah

Merujuk grafik 1.2 yang menunjukkan bahwa pada lima tahun terakhir masih terdapat sejumlah kabupaten atau kota di Jawa Timur dengan angka kemiskinan yang relatif besar, yaitu kabupaten Pacitan, Bondowoso, Probolinggo, Ngawi, Tuban, Sumenep, dan Sampang. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut dapat disebabkan karena sebagian kabupaten masih mengandalkan sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan utama masyarakat. Menurut (Hasibuan et al., 2022) Sebagian besar penduduk desa yang bergantung kepada sektor pertanian pada umumnya berprofesi sebagai pekerja ladang dan pekerja lapangan, dengan penghasilan yang mereka peroleh sangat kecil. Hal tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan kemiskinan.

Tinggi rendahnya kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan jumlah penduduk merupakan salah satu faktornya. Jika jumlah penduduk terus mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka kemudian akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Peningkatan jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap kemiskinan terlebih lagi pada negara berkembang yang mayoritas penduduknya memiliki penghasilan pada tingkat menengah. Menurut Nelson dan Leibenstein dalam jurnal Saharuddin dan Ferri Fauzi dalam (Hasibuan, I. W., Kamaluddin, K., & Hardana, A., 2022) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan populasi yang cepat di negara berkembang mengakibatkan stagnasi kesejahteraan sosial, sehingga kemudian berujung pada menurunnya kesejahteraan dan jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat. Menurut data BPS, provinsi Jawa Timur jumlah penduduknya disetiap tahun menunjukkan peningkatan dan jumlahnya sudah mencapai sekitar 41.149.974 juta jiwa di tahun 2022.

Kualitas sumber daya manusia adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Untuk dapat mengetahui seberapa berkualitasnya sumber daya manusia yaitu dengan merujuk pada nilai dari Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang juga disebut sebagai *Human Development Index* (HDI) adalah standar penilaian pembangunan manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan sebagai indikator untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan (Muliza et al., 2017). Dengan menggunakan 3 indikator untuk mengevaluasi pembangunan manusia yaitu meliputi umur panjang dan hidup sehat (kesehatan),

standar hidup layak (ekonomi), dan pengetahuan (pendidikan). Apabila Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, hal ini dapat berdampak pada menurunnya produktivitas kerja, yang pada akhirnya menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor sangat diperlukan, dan IPM dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana kualitas sumber daya suatu wilayah. Didasarkan dari data BPS, setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur mengalami perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kabupaten atau kota tersebut telah mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusianya. Meskipun Indeks Pembangunan Manusiannya secara konsisten meningkat di setiap tahunnya namun hal itu belum cukup untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur.

Selain Indeks Pembangunan Manusia, kebijakan upah minimum yang telah ditetapkan juga termasuk bagian dari faktor penyebab besarnya tingkat kemiskinan. Ketika upah minimum yang telah ditetapkan memiliki nilai rendah maka akan berdampak terhadap penurunan nilai penghasilan yang akan diterima oleh masyarakat suatu daerah. Adanya upah rendah yang diterima oleh masyarakat dapat menjadi penyebab meningkatnya jumlah kemiskinan, dimana upah rendah akan membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Sedangkan dengan meningkatnya pendapatan yang diterima akan menyebabkan daya beli masyarakat juga mengalami peningkatan yang kemudian dapat berpengaruh terhadap menurunnya kemiskinan. Untuk dapat meningkatkan upah tersebut harus diimbangi dengan berkualitasnya produktivitas. Bagi

kabupaten maupun kota yang upah regionalnya tidak dapat ditentukan, maka upah minimum provinsi digunakan sebagai acuan dasar (Ayu, 2018). Berdasarkan data yang dilansir oleh BPS Jawa Timur, menunjukkan setiap tahunnya upah minimum di Jawa Timur semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terjadi fenomena yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai tingkat kemiskinan nasional. Kenaikan jumlah penduduk di Jawa Timur dapat dikaitkan dengan peningkatan kemiskinan. Dan menurut data BPS, IPM dan upah minimum di Provinsi Jawa Timur semakin tinggi pada setiap tahun. Oleh sebab itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis apakah jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dan upah minimum memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti mengambil judul **“Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Studi Pada Provinsi Jawa Timur”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang tersebut yang sudah dijelaskan, berikut adalah masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan:

1. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur?

3. Apakah Upah Minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dalam judul analisis pengaruh jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan studi pada provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur
3. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur

### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup di sebuah penelitian digunakan untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti agar lebih berfokus dan terarah sehingga tidak keluar dari topik yang dibahas. Peneliti menggunakan variabel dalam penelitian ini yang dibatasi meliputi jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan upah minimum sebagai variabel independen sedangkan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen. Fokus penelitian ini yaitu menggunakan 7 kabupaten di provinsi Jawa Timur selama periode 10 tahun, dari 2013-2022. Dengan pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini dan menggunakan data sekunder.



## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- Menyampaikan wawasan guna memahami bagaimana jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan upah minimum dapat mempengaruhi perubahan tingkat kemiskinan di Jawa Timur, dengan demikian pemerintah setempat mempunyai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan strategi dan kebijakan yang tepat guna mengurangi tingkat kemiskinan di waktu mendatang.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Diharapkan hasil ini dapat menjadi bahan pembandingan bagi penelitian selanjutnya